



SALAM

Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i

P-ISSN: 2356-1459. E-ISSN: 2654-9050

Vol. 10 No. 1 (2023), pp. 125-134

DOI: [10.15408/sjsbs.v10i1.31115](https://doi.org/10.15408/sjsbs.v10i1.31115)

<http://journal.uinjkt.ac.id/index.php/salam/index>



Etika Politik Dalam Pandangan Machievelli dan Al Mawardi*

Iqbal Maulana Alfiansyah,¹ Sofi Mubarak,² Yulia Rimapradesi,³

Nabila Yasmin Namira,⁴ Ida Susilowati⁵

Universitas Darussalam Gontor Indonesia



[10.15408/sjsbs.v10i1.31115](https://doi.org/10.15408/sjsbs.v10i1.31115)

Abstract

Morality is usually closely related to the values and norms that exist in a society. In practice, political ethics requires that all claims to the right to social organization are consistent with fundamental moral principles. Thus, political ethics seeks to help society translate a high national ideology into a realistic political reality. This study discusses Machiavelli's political ethics and its comparison with Islamic political ethics. In this study, the focus is to compare Machiavelli's and Al Mawardi's understanding of political ethics. In this study, the authors used a descriptive methodology and data collection techniques in the form of journals, articles and other literature. Political ethics cannot be applied to international politics which prioritizes personal interests above moral principles. It is considered a principle of realism that a state recognizes its own interests as rights or obligations. At the same time, Islam views political ethics as principles that uphold the values of justice and respect for human rights, so as to create sustainable sustainability based on religious norms.

Keywords: Political Ethics; Machiavelli; Al-Mawardi

Abstrak

Moralitas biasanya berkaitan erat dengan nilai dan norma yang ada dalam suatu masyarakat. Dalam praktiknya, etika politik mensyaratkan bahwa semua klaim atas hak sosial organisasi konsisten dengan prinsip moral fundamental. Dengan demikian, etika politik berusaha membantu masyarakat menerjemahkan ideologi nasional yang tinggi ke dalam realitas politik yang realistis. Kajian ini membahas etika politik Machiavelli dan perbandingannya dengan etika politik Islam. Dalam kajian ini, fokusnya adalah membandingkan pemahaman Machiavelli dan Al Mawardi tentang etika politik. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metodologi deskriptif dan teknik pengumpulan data berupa jurnal, artikel, dan literatur lainnya. Etika politik tidak dapat diterapkan pada politik internasional yang mengutamakan kepentingan pribadi di atas prinsip-prinsip moral. Dianggap sebagai prinsip realisme bahwa suatu negara menyadari kepentingannya sendiri sebagai hak atau kewajiban. Pada saat yang

*Received: January 04, 2023, Revision: January 30, 2023, Published: February 19, 2023.

¹ **Iqbal Maulana Alfiansyah** adalah dosen Hubungan Internasional Universitas Darussalam Gontor. Email: maulanaiqbal@unida.gontor.ac.id

² **Sofi Mubarak** adalah dosen Hubungan Internasional Universitas Darussalam Gontor. Email: sofimubarak@unida.gontor.ac.id

³ **Yulia Rimapradesi** adalah dosen Hubungan Internasional Universitas Darussalam Gontor. Email: yuliarimapradesi@unida.gontor.ac.id

⁴ **Nabila Yasmin Namira** adalah mahasiswa Hubungan Internasional Universitas Darussalam Gontor. Email: Nabila.yasmin.namira@mhs.unida.gontor.ac.id

⁵ **Ida Susilowati** adalah dosen Hubungan Internasional Universitas Darussalam Gontor. Email: idasusilowati@unida.gontor.ac.id

sama, Islam memandang etika politik sebagai prinsip-prinsip yang menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia, sehingga tercipta perdamaian yang berkelanjutan berdasarkan norma-norma agama.

Kata Kunci: Etika Politik; Machievelli; Al Mawardi

A. PENDAHULUAN

Politik tidak dapat terlepas dari kehidupan manusia. Hal ini dikarenakan politik sebagai sebuah sistem yang mengatur hubungan antar manusia dalam memenuhi kebutuhannya dan membawa mereka kepada tujuan yang mereka harapkan. Etika politik merupakan salah satu sarana yang diharapkan bisa menghasilkan suasana harmonis antar pelakunya dan antar kekuatan sosial politik serta antar kelompok kepentingan lainnya untuk mencapai sebesar-besarnya kemajuan negara dan bangsa dengan mendahulukan kepentingan bersama sebelum kepentingan pribadi dan golongan. Pokok-pokok dalam etika kehidupan berbangsa dan bernegara menjunjung nilai kejujuran, amanah, keteladanan, sportifitas, disiplin, etos kerja, kemandirian, sikap toleransi, tanggung jawab, rasa malu, dan menjaga kehormatan serta martabat diri sebagai warga bangsa. Etika politik mempunyai tujuan kepadasetiap elite politik dan petinggi negara untuk bersikap jujur, sportif, amanah, berjiwa besar, siap melayani, memiliki keteladanan, berjiwa besar, dan rendah hati.

Peran etika atau moral yang begitu penting menjadikan para pemikir politik memberikan buah pikirannya tentang hal ini. Seperti St. Thomas Aquinas yang menyatakan untuk mengintegrasikan agama dan kekuasaan yang ia gambarkan dalam hukum abadi yang berasal dari akal abadi Tuhan.⁶ Namun, seiring berjalannya waktu terjadi pemisahan antara etika dengan politik pada Abad ke 16 oleh seorang negarawan Italia bernama Niccolo Machiavelli yang berpaham realisme.⁷ Dalam pandangannya, etika tidak diperlukan dalam kekuasaan, hanya bila memberikan keuntungan maka etika bisa digunakan. Hal ini yang kemudian menjadi masalah tersendiri dalam kajian politik, khususnya kaitannya dengan etika. Bagi Machiavelli, berfikir terlalu teoritis tidaklah menarik, pengalaman empiris di berbagai negara lebih menarik dalam pandangannya.⁸ Kekuasaan dalam berbagai konsep banyak diperbincangkan dalam berbagai perspektif. Tapi ketika dihadapkan pada realita praktis, tuntutan yang muncul bahwa kekuasaan harus mewujudkan demokrasi. Persoalan signifikan bukan pada apa itu kekuasaan yang demokratis, tapi bagaimana mewujudkan kekuasaan yang demokratis tersebut.

Bagi Machiavelli, kekuasaan negara harus diwujudkan dengan angkatan perang yang kuat dan tangguh, dan raja harus mewujudkannya untuk melindungi rakyat. Tidak peduli peran kekuasaan raja dalam mewujudkannya, sebab ditangan raja segala keputusan berada, maka kebebasan berpartisipasi dalam mengontrol kebebasan sangat sulit. Selain itu, Machiavelli juga lebih melihat kekuasaan sebagai persoalan

⁶ Syam Firdaus, *Pemikiran Politik Barat, Sejarah, Filsafat, Ideologi Dan Pengaruhnya Terhadap Dunia Ke-3*. (Jakarta: PT Bumi Aksara., 2007).

⁷ Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Politik* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2009).

⁸ Mia Rinekasswara, "Analisis Perilaku Politik Di Indonesia Dalam Perspektif Filsafat Politik Niccolo Machiavelli," *Universitas Walisongo* (n.d.).

hubungan antara penguasa dan yang dikuasai, dimana penguasa dipandang memiliki kemampuan untuk memimpin negara dan memiliki wewenang untuk mengatur negara. Hal ini seakan menyatakan bahwa apa yang diyakini oleh Realisme sangat bertentangan dengan apa yang diyakini oleh Islam. Realisme menjunjung kemenangan dan pencapaian tujuan tanpa mementingkan apa yang dilakukannya, meski harus merugikan orang lain.

Sementara, etika dalam pandangan Islam mencakup segala aspek kehidupan manusia, menjelaskan dan mengatur hubungan manusia dengan Allah dan hubungan manusia dengan sesama serta hubungan manusia dengan lingkungan. Etika politik mengandung tiga tuntutan, yaitu; upaya hidup baik bersama dan untuk orang lain, upaya untuk memperluas lingkup kebebasan, untuk membangun institusi-institusi yang adil. Penerapan nilai etika dan moral merupakan suatu keharusan, tak terkecuali urusan penyelenggaraan negara, sebab Rasulullah SAW mendirikan pemerintahan pun dengan nilai akhlaqul karimah yang harus diteladani setiap muslim. Dalam Islam, Implementasi konsep kekuasaan dalam negara didasarkan atas beberapa asas dan prinsip yang dijelaskan dalam Alquran dan Sunnah seperti; Prinsip kekuasaan sebagai amanah, Prinsip musyawarah, Prinsip keadilan, Prinsip persamaan, Prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM), Prinsip peradilan bebas, Prinsip perdamaian, Prinsip kesejahteraan, dan Prinsip ketaatan rakyat.⁹

Pemahaman etika politik menurut Realisme dan Islam sangatlah bertolak belakang. Meskipun keduanya memiliki tujuan untuk menuntaskan kepentingan yang telah ditetapkan, namun keduanya melakukan praktik yang berbeda. Keduanya meyakini bahwa apa yang mereka pahami akan membawa mereka menuju tujuan yang diharapkan. Realisme sangat menjunjung tinggi tercapainya tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya, sementara Islam menjunjung tinggi kejujuran, keadilan dan beberapa aspek lainnya yang diyakini akan memberikan kemenangan dengan murni. Sehingga secara praktik, Realisme akan melakukan berbagai cara demi terwujudnya tujuan yang telah ditetapkan, sementara Islam akan tetap berpolitik dengan prinsip-prinsip yang berkaitan dengan akhlaq sebagai inti sebuah praktik politik. Dari latar belakang tersebut, dalam penelitian ini akan dibahas perbandingan etika politik antara pemikir realisme yaitu Nicollo Machievelli dan pemikir muslim yaitu Al Mawardi.

B. METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode kualitatif dengan pengumpulan data yang dilakukan melalui analisa dokumen dan pemaknaan. Menurut Moleong, penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian, misalnya perilaku, motivasi, tindakan dan lain sebagainya secara holistik dan dengan cara deskriptif dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah.¹⁰ Pengumpulan data

⁹ Abu Hamid Muhammad, *Al Iqtishad Fi Al I'tiqad* (Mesir: Makatabah al Jundi, 1518).

¹⁰ Kuntjojo, *Metode Penelitian*. (Kediri: Universitas Nusantara PGRI, 2009).

menggunakan metode kepustakaan dengan mengambil sumber dari buku, jurnal, artikel dan beberapa bacaan yang bersumber dari internet.

C. HASIL TEMUAN DAN PEMBAHASAN

1. Pengertian Etika Politik

Kata etika secara Bahasa berasal dari Bahasa Yunani Kuno 'ethos' yang memiliki berbagai arti; tempat tinggal yang biasa, kebiasaan, adat, akhlak, kendang, padang rumput, watak, perasaan, sikap, cara berfikir. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, makna kata etika dibagi menjadi 3 pemaknaan, yaitu; *Pertama*, ilmu tentang sesuatu yang baik dan yangburuk serta mengenai hak dan kewajiban moral (Akhlak). *Kedua*, gabungan asas atau nilai yang berkaitan dengan akhlak. *Ketiga*, nilai mengenai benar dan salah yang dianut suatu golongan dan masyarakat.¹¹ Sejalan dengan makna sebestunya, John L. Esposito mengungkapkan bahwa etika merupakan studi yang berkaitan dengan *practical justification*. Etika lebih terfokus pada mengabstraksikan dan mengevaluasi *reason individual* atau kelompok tertentu, yang menentukan *judgement* kepada mereka, tentang benar dan salah, baik dan buruk, yang biasanya berkaitan erat dengan perbuatan manusia, baik sikap, maupun kepercayaan mereka.¹²

Secara bahasa, kata politik berasal dari kata Bahasa Inggris 'politics' berarti mengatur. Sedangkan dalam Bahasa Arab diistilahkan 'siyasah' yang berarti mengatur, mengurus, dan memerintah. Sementara pengertian politik dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki beberapa arti seperti; *Pertama*, ilmu pengetahuan tentang tata negara atau kenegaraan. *Kedua*, semua urusan dan tindakan kebijakan tentang pemerintah negara atau terhadap negara lain. *Ketiga*, cara bertindak dalam menangani atau menghadapi masalah.¹³ Ramlan Surbakti mengatakan bahwa politik adalah interaksi antar pemerintah dan masyarakat, dalam rangka proses pembuatan atau pelaksanaan keputusan yang mengikat mengenai kebijakan bersama masyarakat yang menetap di wilayah tertentu.¹⁴ Sehingga dapat disimpulkan bahwa politik adalah sarana untuk mengatur dan mengurus kebijakan demi tercapainya tujuan yang diinginkan.

Dengan penjelasan tentang etika dan politik diatas, maka makna etika politik adalah kumpulan nilai yang berhubungan dengan akhlak guna mengatur dan memimpin sesuatu dengan cara yang mendatangkan kemaslahatan. Selain itu etika politik dapat berfungsi sebagai sarana kritik ideologi berupa paham-paham dan strategi legitimasi yang mendasari penyelenggaraan negara. Etika politik sangat terkait dengan kekuasaan. Etika politik bersifat metafisis dan dianggap kurang realistis. Dalam pandangan filsafat etika, politisi harus bertindak benar, bertanggung jawab atas argumentasi dalam perilaku politik mereka.¹⁵ Karena apapun yang terjadi di

¹¹ KBBI, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. (Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Balai Pustaka, 2016).

¹² Bertens, *Etika* (Jakarta: Gramedia, 2000).

¹³ KBBI, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*.

¹⁴ Ramlan Surbakti, *Memahami Ilmu Politik* (Jakarta: Gramedia Widia Sarana Indonesia, 1999).

¹⁵ 57-68. Hariantati Runi, Runi, H. (2003). Etika Politik dalam Negara Demokrasi Oleh: Runi

lingkungan masyarakat, meski baik maupun buruksangat bergantung pada keputusan politik. Etika politik tidak berada ditingkat sistem legitimasi politik tertentu dan tidak dapat menyaingi suatu ideologi negara. Namun, etika politik dapat membantu usaha masyarakat untuk mewujudkan ideologi negara yang luhur kedalam realitas politik yang nyata.

2. Etika Politik Realisme dalam Pandangan Nicollo Machievelli

Machiavelli adalah seorang filosof yang mendobrak tradisi filsafat abad pertengahan yang dipengaruhi oleh cara pandang yang metafisis. Metafisika yang kuat dimasa lalu adalah pengaruh dari gereja Katolik. Bukti tersebut tertuang dalam dari beberapa karya-karya intelektual dan filsafat yang ditulis oleh *cruchmen*, termasuk karya-karya *ecclesiastical philosophy* yang dibuat oleh para pujangga gereja. Pada masa itu, peradaban lama diperbaharui oleh peradaban baru yang bertujuan untuk mendapatkan kesempurnaan pandangan hidup yang masih berwatak kristiani. Peradaban yang dipelopori oleh humanis italia ini terjadi pada berbagai bidang seperti seni dan ilmu pengetahuan. Kondisi seperti itulah yang membentuk pribadi Machiavelli sebagai seorang filosof yang hidup dimasa kejayaan pemikiran humanis Italia dan kemunduran pemikiran Gereja Katolik.¹⁶ Pengaruh zaman Renaissance juga turut memperburuk kondisi sosial ketika itu. Pada masa itu, masyarakat mulai melepaskan diri dari kekangan geraja dan paham skolastik. Moral tidak lagi dipedulikan, pengkhianatan dalam berkawan, nafsu untuk berkuasa tanpa memperhatikan lagi segi kewajaran yang merajalela serta menumbuhkan rasa kecurigaan antar kawan sampai tingkat pemerintahan.

Politik bagi Machiavelli adalah urusan bagaimana seorang pangeran mengatur kebijakan tingkah lakunya terhadap rakyat dan teman-temannya. Machiavelli sadar bawa banyak karya yang telah membahas akan hal ini, namun ia menegaskan bahwa ia bertolak dari kenyataan real, bukan realitas imajinatif. Kenyataan real yang dimaksud adalah hal-hal yang langsung dimanfaatkan oleh seorang pangeran dalam mengatur kebijakannya. Ia juga menyatakan untuk tidak menjadi seorang yang mulia, karena menurutnya hal itu akan menjadikannya menjadi hina dan lemah, bila demikian wibawanya akan jatuh dimata rakyat. Bahkan akan ada kemungkinan terjadinya pemberontakan dari rakyat karena menganggap rajanya tidak tegas dan tidak berani. Sedangkan kekerasan akan mewujudkan peraturan stabil dan dapat menghindari keributan. Machiavelli juga mengatakan bahwa seorang raja tak perlu berpedoman pada kerelaan rakyat, karena hal tersebut akan selalu berubah-ubah. Bila seorang raja konsisten pada kekuatannya, maka ia akan mampu mempertahankannya. Bagi Machiavelli, legitimasi moral bukanlah hal yang utama, karena kestabilan dan kelestarian kekuasaan lebih penting. Ia memang melawan arus pemikiran saat itu, Machiavelli menganut sinisme terhadap moral dalam filsafat politik dan dengan berani mencurahkan pemikirannya bahwa tujuan berpolitik bagi penguasa adalah

Hariantati. Demokrasi, no 1, "Etika Politik Dalam Negara Demokrasi Oleh: Runi Hariantati," *Demokrasi* no 1 (2003): 57-68.

¹⁶ Harun Hadiwijono, *Sari Sejarah Filsafat Barat 2* (Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 1980).

mengamankan kekuasaan yang ia miliki saat itu.¹⁷

Machiavelli menganjurkan negara kekuasaan daripada negara hukum. Hal tersebut disebabkan oleh fokus kekuasaan yang diyakininya. Oleh karena itu, ia menyarankan kepada para penguasa agar mempelajari sifat terpuji maupun yang tidak terpuji. Dalam perilaku tidak terpuji, seorang penguasa dapat bertindak bengis, kejam, kikir dan khianat asal menguntungkan bagi kekuasaan dan negaranya. Namun, Machiavelli juga menasehati para penguasa untuk mengiringi sifat tersebut dengan tindakan simpatik, kasih sayang terhadap rakyat, dan menciptakan ketergantungan rakyat pada penguasa, karena dengan begitu ia tidak akan dibenci dan pemberontakan mustahil terjadi. Pandangan Machiavelli yang sekuler dalam politik dan sikapnya yang kritis atas etika, secara fundamental turut memengaruhi pandangannya tentang pemimpin dan negara. Baginya, negara adakah sebuah konsep yang bersifat impersonal, negara bukanlah pribadi.¹⁸

Dalam politik luar negerinya, Machiavelli menekankan bahwa seorang pangeran harus memiliki kemampuan diplomasi yang lihai. Ia harus mampu berdiplomasi dengan muslihat singa dan rubah. Singa sebagai raja hutan memiliki kekuasaan dikarenakan kekuatannya dan kebuasannya sehingga hewan-hewan lainnya tunduk dan takut kepadanya. Kemudian kelihaihan dan kecerdikan rubah dalam tipu muslihat mampu menyelamatkan dirinya dari jebakan hewan lain atau dari pemburu. Dua hal ini sangat ditekankan oleh Machiavelli sebagai kemampuan yang dikuasai para penguasa dalam berdiplomasi. Ia menganggap bahwa dunia ini layaknya hutan belantara, dimana para penghuninya pun seperti apa yang ada didalam hutan. Ia tak harus menepati janjinya bila pihak lainnya tak memberikan keuntungan baginya. Ia harus bersikap seolah-olah baik didepan raja-raja lainnya, bagaikan serigala yang berbulu domba. Machiavelli selalu menekankan bahwa semua penguasa memiliki pemikiran yang sama, mereka akan berkhianat pada waktunya. Maka setiap penguasa harus memiliki sifat cerdik seekor rubah dengan segala tipu muslihat, jika hal itu gagal maka ia harus menerapkan sifat singa yang ditakuti dengan kata lain menabuhkan genderang perang.¹⁹

Pemikiran Machiavelli selalu mengutarakan akan pentingnya kekuasaan dan cara mempertahankannya, apapun caranya, bagaimanapun prosesnya. Bagi Machiavelli, seorang pemimpin akan dinilai berhasil saat dia berhasil mewujudkan kebijakan yang stabil dan dapat menghindari pertikaian didalam wilayahnya. Atau dengan kata lain, demi mempertahankan kekuasaan ditengah perebutan kekuasaan, segala cara dapat diterapkan asal dapat mewujudkan tujuan yang diinginkan, meskipun menggunakan kekerasan dan cara-cara curang sekalipun. Kerelaan rakyat bukanlah tujuan utama, karena itu akan selalu berubah-ubah seiring berjalannya waktu. Kenyataan tersebut sebagaimana yang dialami machievelli saat muda, bahwa seorang humanis Italia yang merubah sebagian dari hidupnya berubah akibat

¹⁷ Sri Hastuti Puspitasari, "Kontekstualisasi Pemikiran Machiavelli Tentang Kekuasaan -Tujuan Negara," *Jurnal Hukum* 8, no. 18 (2001): 30–45.

¹⁸ William, "Machiavelli's Prince.," *International Journal of Ethics*, no. 476–492 (1892).

¹⁹ Nicollo Machiavelli, *The Prince: Sang Penguasa* (Surabaya: Ecosystem, 2018).

berubahnya peradaban saat itu. Namun demikian, Machiavelli tidak menafikkan peran etika dan agama secara keseluruhan. Ia hanya menganggap bahwa etika dan agama tidak terlalu memberikan efek positif dalam hal kekuasaan dan pemerintahan. Kedua hal tersebut hanya akan bermanfaat jika benar-benar memberikan manfaat secara praktis dalam tujuan kekuasaan.²⁰

3. Etika Politik Islam Menurut Al Mawardi

Persoalan etika politik merupakan sesuatu yang sangat penting dalam agama Islam. *Pertama*, politik dipandang sebagai bagian dari ibadah, karenanya politik harus dilaksanakan dengan prinsip-prinsip ibadah. Dalam berpolitik tidak boleh melanggar perintah-perintah dalam beribadah, karena pelanggaran prinsip ibadah akan merusak kesucian politik itu sendiri. *Kedua*, etika politik dipandang sangat perlu karena politik berhubungan dengan prinsip Islam dalam mengelola masyarakat. Politik adalah salah satu sarana yang menyangkut hubungan antar manusia, maka harus diterapkan prinsip-prinsip *mu'amalah* yang telah diajarkan seperti saling menghormati, menghargai hak orang lain, saling menerima dan tidak memaksakan pendapat sendiri.²¹ Hubungan antara etika dan politik dalam agama Islam amatlah erat, hal tersebut dikarenakan salah satu asas pada teori politik Islam adalah tidak adanya pemisahan antara negara dan agama. Islam bukanlah sekedar agama seperti dalam perspektif sekulerisme, melainkan mencakup semua pola hidup yang lengkap dengan pengaturan dalam segala aspek kehidupan, termasuk politik.

Islam mempunyai dua sumber, yaitu al-Qur'an dan Sunnah yang menjadi fondasi dalam menentukan segala urusan dunia dan akhirat. Kedua sumber tersebut sekaligus menjadi sumber akhlak Islamiah, yang dimana seluruh prinsipnya berlandaskan pada wahyu yang bersifat mutlak.²² Sedangkan di dunia ini ada dua nilai yang menentukan perbuatan manusia, yaitu baik dan buruk, betul dan salah. Penilaian inilah yang menjadi tolak ukur manusia dalam kepribadiannya. Akhlak berfungsi untuk mengkaji dan meneliti aspek perilaku dan perbuatan manusia. Akhlak yang menilai dari segi baik maupun buruk, serta patut tidaknya sebuah tindakan yang dilakukan seorang manusia.²³

Al-Mawardi sangat menjunjung tinggi nilai etika dalam berpolitik. Pemikiran politiknya dilandasi kerangka politik yang berdasarkan prinsip Islam (*fiqh*). Al-Mawardi berpendapat bahwa dalam pembentukan sebuah negara, manusia harus melakukan kerjasama antara satu dengan lainnya, karena manusia merupakan makhluk sosial, sehingga mereka harus berkomunikasi dengan orang lain dan tak akan

²⁰ Fuad Muhammad Zein, "Kritik Konsep Politik Machiavelli Dalam Perspektif Etika Politik Islam (Perbandingan Dengan Teori Etika Politik Al Mawardi)," *Jurnal Mahkamah: Kajian Ilmu Hukum Dan Hukum Islam* 1.2 489-507. (2016).

²¹ Sugiyono, "Konsep Etika Politik Dalam Perspektif Ali Syari'ati," *Skripsi*, no. 1-85 (2009).

²² Bujang Efendi, "Etika Politik Islam Indonesia: Studi Atas Konsep Dan Aksi Politik M. Natsir (1908-1993)," *Disertasi* UIN Raden (n.d.).

²³ Setyo Pawestri, "Etika Politik Dan Radikalisme Yang Terjadi Di Indonesia Ditinjau Melalui Pandangan Para Ahli Aristoteles dan Machiavelli," *Sekolah Tinggi Keguruan Dan Ilmu Pendidikan*. Madiun (2019).

memenuhi kebutuhannya tanpa bantuan oranglain. Dengan adanya perbedaan, keberagaman, kecenderungan alami menjadikan manusia bersatu dan saling bantu hingga akhirnya sepakat membentuk suatu negara.²⁴ Menurut al-Mawardi, berdirinya negara membutuhkan 6 sendi utama, diantaranya; 1) Agama, bahwa agama adalah pedoman dan sendi dasar kehidupan masyarakat untuk membangkitkan semangat dalam membangun dan melestarikan alam. 2) Penguasa karismatik, kekuasaan yang berwibawa lahir dari seorang pemimpin yang bijaksana. Dengan wibawanya, ia memiliki otoritas yang melekat pada dirinya dan dapat menjadi pemersatu dari aspirasi rakyat yang berbeda-beda. 3) Keadilan menyeluruh. Keadilan sangat penting karena dengannya akan tercipta kerukunan sesama rakyat negara dan menumbuhkan rasa hormat serta ketaatan kepada pemimpin. 4) Keamanan yang kuat dan menjamin. Dengan adanya keamanan yang kuat dan menjamin membuat rakyat tenang dan tidak khawatir, jika begitu maka masyarakat akan bertindak dengan inisiatif dan kreatif serta taat pada pemimpin. 5) Kesuburan tanah. Tanah yang subur akan membuat pangan rakyat stabil bahkan berkembang. Tanah yang subur juga dapat menjadi kekayaan negara. 6) Harapan, bahwa generasi saat ini dan selanjutnya sangat bergantung pada kebijakan penguasa sehingga haruslah ada harapan yang membuat mereka percaya.²⁵

Baginya seorang pemimpin atau *imamah* dipilih melalui dua hal; *Pertama*, dipilih melalui sebuah badan atau lembaga yang biasa disebut *ahl al-'aqd wa al-hal* atau *ahl-ikhtiyar*. *Kedua*, dipilih oleh pemimpin sebelumnya. Sementara lembaga yang memilihnya harus memenuhi 3 kriteria; *Pertama*, berlaku adil, dengan segala persyaratannya dalam segala sikap dan tingkah lakunya. *Kedua*, memiliki pengetahuan, yang dengannya dapat mengetahui siapa yang berhak menjadi kepala atau pemimpin negara, berdasarkan kualifikasi yang ditentukan, *Ketiga*, memiliki wawasan dan kearifan yang dapat digunakan untuk memilih imam yang mampu dan layak mengelola urusan negara dan rakyat. Adapun kriteria pemimpin menurut al-Mawardi adalah: 1) sikap adil dengan segala persyaratannya, 2) memiliki pengetahuan yang dapat dipergunakan untuk mengambil *ijtihad* atau keputusan dalam menghadapi problematika negara, 3) sehat pendengaran, pengelihatannya dan lisannya, 4) utuh anggota badannya, 5) mempunyai kebijakan dalam mengatur kehidupan rakyat dan kepentingan umum, 6) mempunyai keberanian untuk memerangi musuh, 7) merupakan keturunan Quraisy.²⁶

Dalam *Tashil al-Nazhar*, al-Mawardi berpesan pada penguasa untuk senantiasa berperilaku mulia. Beliau mengatakan bahwa seseorang yang dipercaya untuk memegang kekuasaan harus selalu mengutamakan akhlaknya dan memperbaiki tingkah lakunya. Hal ini ditegaskan untuk menjadi prinsip kekuasaannya. Al-Mawardi berpesan pada para penguasa untuk berhati-hati dan lebih memperhatikan saran dan masukan para pembisik yang munafik, ia harus belajar mengenali dan menyeleksi antara penasihat yang dapat dipercaya dan penasihat yang hanya mementingkan kepentingannya saja. Penguasa harus menjaga dirinya dari perbuatan tercela dan

²⁴ Rashda Diana, Siswanto Masruri, and Surwandono Surwandono, "Etika Politik Dalam Perspektif Al-Mawardi," *Tsaqafah* 14, no. 2 (2018): 363.

²⁵ Al-Mawardi, *Al-Ahkam Al-Sulthaniyyah* (Beirut.: Dar al-Fikr, 1960).

²⁶ Al-Mawardi, *Adab Al-Dunyil Wa Al-Din* (Kairo: Mathba'ah al-Amriyyah, 1995).

menekankan kepada rakyatnya untuk selalu menerapkan perbuatan terpuji dan bertanggungjawab atas segala yang dilakukannya.²⁷

Berdasarkan penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahwa al-Mawardi sangat menekankan akan pentingnya moral dan etika dalam penerapan politik. Ia juga berpendapat bahwa seorang pemimpin harus memiliki beberapa sifat yang diterapkan dalam Alquran dan Sunnah. Hingga perlunya sosialisasi pada masyarakat bahwa perilaku politik yang sebenarnya adalah dengan menerapkan nilai-nilai etika dan moral. Sebagaimana Islam menjunjung tinggi etika dan moral, seperti itulah penerapan etika dalam politik menurut al- Mawardi dalam perspektif Islam.²⁸

D. KESIMPULAN

Etika politik merupakan serangkaian nilai yang berhubungan dengan akhlak dalam mengatur dan mengelola suatu negara. Menurut Machiavelli, etika dan moral dalam politik bukanlah hal yang penting. Hal tersebut hanya dilakukan jika etika dan moral dapat memberikan keuntungan pada negara. Machiavelli bahkan menyarankan para penguasa untuk menerapkan metode singa dan rubah. Pandangannya tentang dunia begitu kejam sehingga menganggapnya sebagai hutan belantara, dimana penghuninya saling menikam demi kehidupan yang diinginkan. Maka metode singa sebagai sosok yang berkuasa dan rubah sebagai sosok yang penuh tipu muslihat perlu diterapkan. Machiavelli menghalalkan segala cara demi terwujudnya tujuan negara yang ia inginkan. Baginya, seorang penguasa harus mempelajari sifat terpuji dan sifat tidak terpuji. Karena seorang penguasa dapat bersifat kejam, bengis, kikir, dan khianat saat beradu dengan musuh, sementara harus tetap empati, penuh kasih sayang dan peduli pada seluruh rakyatnya dei mencegah adanya pemberontakan. Apa yang dikemukakan oleh Machiavelli tidak luput dan tidak terlepas dari apa yang ia lalui dimasa lalu.

Hal tersebut tentunya sangat bertolak belakang dengan pemikiran al-Mawardi, bahwaseorang pemimpin seharusnya memiliki dan menerapkan nilai-nilai etika dan moral. Bahkan, untuk menjadi seorang pemimpin, atau hanya lembaga yang memilih, ia perlu memiliki perilaku yang selaras dengan nilai etika. Ia juga menyarankan kepada seluruh pemimpin untuk tetap menjaga dirinya dari perilaku tidak terpuji, bahkan menerapkan kepada seluruh rakyat nya untuk mengamalkan nilai-nilai etika dan bertanggungjawab atas apa yang dilakukannya.

REFERENSI:

Al-Mawardi. *Adab Al-Dunyil Wa Al-Din*. Kairo: Mathba'ah al-Amriyyah, 1995.

Al-Mawardi. *Al-Ahkam Al-Sulthaniyyah*. Beirut.: Dar al-Fikr, 1960.

²⁷ Al-Mawardi, *Tahsil Al-Nazhar Wa Ta'jil Al-Zhafar* (Beirut: Dar al-Nahdhah, 1981).

²⁸ Imam Mawardi, "Dimensi-Dimensi Masyarakat Madani: Membangun Kultur Etika Sosial," *Cakrawala: Jurnal Studi Islam* 10, no. 2 (2015): 156–174.

- Al-Mawardi. *Tahsil Al-Nazhar Wa Ta'jil Al-Zhafar*. Beirut: Dar al-Nahdhah, 1981.
- Bertens. *Etika*. Jakarta: Gramedia, 2000.
- Budiardjo, Miriam. *Dasar-Dasar Politik*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2009.
- Diana, Rashda, Siswanto Masruri, and Surwandono Surwandono. "Etika Politik Dalam Perspektif Al-Mawardi." *Tsaqafah* 14, no. 2 (2018): 363.
- Efendi, Bujang. "ETIKA POLITIK ISLAM INDONESIA: Studi Atas Konsep Dan Aksi Politik M. Natsir (1908-1993)." *Disertasi* UIN Raden (n.d.).
- Firdaus, Syam. *Pemikiran Politik Barat, Sejarah, Filsafat, Ideologi Dan Pengaruhnya Terhadap Dunia Ke-3*. Jakarta: PT Bumi Aksara., 2007.
- Hadiwijono, Harun. *Sari Sejarah Filsafat Barat 2*. Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 1980.
- KBBI. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Balai Pustaka, 2016.
- Kuntjojo. *Metode Penelitian*. Kediri: Universitas Nusantara PGRI, 2009.
- Machiavelli, Nicollo. *The Prince: Sang Penguasa*. Surabaya: Ecosystem, 2018.
- Mawardi, Imam. "Dimensi-Dimensi Masyarakat Madani: Membangun Kultur Etika Sosial." *Cakrawala: Jurnal Studi Islam* 10, no. 2 (2015): 156–174.
- Muhammad, Abu Hamid. *Al Iqtishad Fi Al I'tiqad*. Mesir: Makatabah al Jundi, 1518.
- Pawestri, Setyo. "Etika Politik Dan Radikalisme Yang Terjadi Di Indonesia Ditinjau Melalui Pandangan Para Ahli Aristoteles Dan Machiavelli." *SEKOLAH TINGGI KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN* Madiun (2019).
- Puspitasari, Sri Hastuti. "Kontekstualisasi Pemikiran Machiavelli Tentang Kekuasaan - Tujuan Negara." *Jurnal Hukum* 8, no. 18 (2001): 30–45.
- Rinekasswara, Mia. "Analisis Perilaku Politik Di Indonesia Dalam Perspektif Filsafat Politik Niccolo Machiavelli." *Universitas Walisongo* (n.d.).
- Runi, Runi, H. (2003). Etika Politik dalam Negara Demokrasi Oleh: Runi Hariantati. *Demokrasi*, no 1, 57–68. Hariantati. "Etika Politik Dalam Negara Demokrasi Oleh: Runi Hariantati." *Demokrasi* no 1 (2003): 57–68.
- Sugiyono. "Konsep Etika Politik Dalam Perspektif Ali Syari'ati." *Skripsi*, no. 1–85 (2009).
- Surbakti, Ramlan. *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Widia Sarana Indonesia, 1999.
- William. "Machiavelli's Prince." *International Journal of Ethics*, no. 476–492 (1892).
- Zein, Fuad Muhammad. "Kritik Konsep Politik Machiavelli Dalam Perspektif Etika Politik Islam (Perbandingan Dengan Teori Etika Politik Al Mawardi)." *Jurnal Mahkamah: Kajian Ilmu Hukum Dan Hukum Islam* 1.2 489-507. (2016).